

# LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

**Triwulan II Tahun 2023**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini, benar-benar didasarkan proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan yang dilaksanakan, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi unit layanan guna peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan masyarakat. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna sesuai yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja pelayanan pengaduan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Demikian semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Banyuwangi, Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PARTANA, S.AP, M.SI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197201201994031004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN.....	7
2.1. MEDIA, SARANA PENGADUAN, ALUR LAYANAN DAN SDM.....	7
2.1.1. Media dan Sarana Pengaduan.....	7
2.1.2. Alur layanan.....	8
2.1.3. Sumber daya Manusia.....	8
2.2. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....	9
2.2.1. Status Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	9
2.2.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	9
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	11
A. Hambatan.....	11
B. Upaya Penyelesaian.....	11
BAB III PENUTUP.....	13
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>13</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Saat sekarang ini pelayanan administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kabupaten dan Kota berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya agar kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertambahan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan pengaduan wajib menyediakan sarana pengaduan di unit penyelenggara pelayanan. Wajib menyusun mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan serta tindakan korektif harus terbuka bagi publik dan diinformasikan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik pada setiap penyelenggara.

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik tidak hanya menguatkan partisipasi masyarakat tapi lebih dari itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Olehnya itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pelayanan dapat memahami dan menerapkan secara sungguh-sungguh semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai cerminan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melayani masyarakatnya.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati Banyuwangi No 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
7. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor 11 tahun 2023.
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/Kep/429.011/2022 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1036/Kep/429.011/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
10. Keputusan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tentang Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1) Maksud:

Buku laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan pengaduan dan konsultasi masyarakat yang masuk ke DPMPTSP selama periode Triwulan II (April, Mei dan Juni), Laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan.

#### 2) Tujuan:

- a. Dokumentasi: Mendokumentasikan seluruh proses penanganan pengaduan dan konsultasi masyarakat, mulai dari penerimaan pengaduan hingga tindak lanjut.
- b. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP dalam merespon aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
- c. Transparansi: Memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai penanganan pengaduan dan konsultasi.
- d. Evaluasi: Menjadi bahan evaluasi kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan.
- e. Perbaikan: Mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pelayanan perizinan.
- f. Pengambilan Keputusan: Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

### 2.1. MEDIA, SARANA PENGADUAN, ALUR LAYANAN DAN SDM

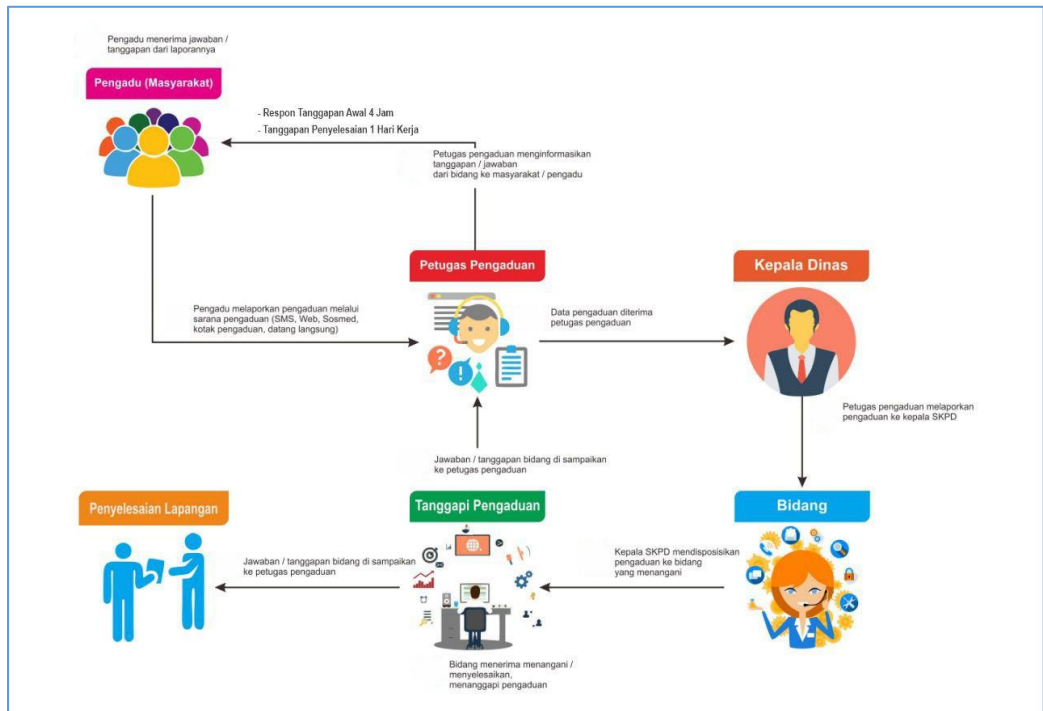
#### 2.1.1. Media dan Sarana Pengaduan

Pengaduan dan Kondultasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara *Online* dan secara offline, penyampain keluhan, laporan, kritik dan saran melalui sarana pengaduan yang telah kami persiapkan melalui media berikut:

No	Media	Keterangan
1	Layanan Pengaduan MPP dan DPMPTSP	a. Telephone/Whastapp/SMS Petugas : 0811-3447-666 b. Telephon/Faximile kantor dpmptsp: 0333-412343 c. E-mail: dpmptsp@banyuwangikab.go.id d. Facebook: dpmptsp.bwi e. Instagram: mpp.banyuwangi dan dpmptsp.banyuwangi
2	Pengaduan Pemkab Banyuwangi	a. Call Center 112 / 082-131-545-555 b. SMS Center/Whatsapp 082-131-545-555 c. Website : pengaduan.banyuwangikab.go.id d. Instagram : Banyuwangi_kab e. Twitter : @banyuwangi_kab f. Facebook : KabupatenBanyuwangi; g. Smartkampung

3	LAPOR SP4N	1708 (SMS) www.lapor.go.id
---	------------	-------------------------------

### 2.1.2. Alur layanan



### 2.1.3. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia di bidang PTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, adapun sumber daya manusia terdiri atas Penanggungjawab Pengaduan dan Pengelola Pengaduan Publik. Berikut kami sampaikan sebagai berikut:

- Penanggungjawab Pengaduan sebagai pengendali atas pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- Pengelola Pengaduan merupakan petugas yang mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan.

**Komposisi Sumber Daya Manusia  
Penanganan Pengaduan Masyarakat**

NO	FUNGSI	JUMLAH
1	Penanggung jawab Pengaduan	1 Orang
2	Pengelola Pengaduan	1 Orang

**2.2. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**2.2.1. Status Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Kelompok Jabatan Fungsional yang melayani pengaduan di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dari mulai tanggal 01 April 2023 s.d 30 Juni 2023 telah menerima pengaduan sebanyak 19 (Sembilan Belas). Berikut Rekap Penyelesaian Pengaduan dan Konsultasi yang masuk melalui berbagai kanal aduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

No	Bulan	Pengaduan Masuk	Pengaduan Ditindaklanjuti	Keterangan
1	Januari	9	9	Selesai
2	Februari	4	4	Selesai
3	Maret	6	6	Selesai
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	

Capaian kinerja atas tindaklanjut penanganan pengaduan dan konsultasi adalah 100%, hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi untuk terus melaksanakan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan kedepannya.

**2.2.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPSTSP per saluran dari Bulan April s.d Juni (Triwulan II) dapat dilihat pada dibawah ini :

### Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	Website	0
2	SMS	0
3	Smart Kampung	4
4	Telfon 112	0
5	Whatsapp	15
6	SP4N LAPOR!	0
7	Giat Langsung	0
8	Kotak Saran/Pengaduan	0
<b>Total</b>		19

Berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh media/sarana pengaduan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu bulan April s/d Juni hasilnya ada sebanyak 19 (Sembilan Belas) dengan data terbanyak masuk melalui media Whatsapp sebanyak 15 dan Smartkampung sebanyak 4, pengaduan masyarakat yang disampaikan terlampir (Lampiran 1).

### **BAB III**

## **HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

#### **A. Hambatan**

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan layanan pengaduan, antara lain :

1. Masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap Teknologi Informasi, sehingga dimungkinkan proses pengaduan melalui berbagai media informasi yang disediakan tidak dapat dilakukan dengan baik.
2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelayanan publik sangat rendah dan hal ini menjadi hambatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam menyaring informasi dari masyarakat terhadap kualitas keseluruhan proses pelayanan yang diterima.
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya aparatur menjadi hambatan untuk mendukung proses pelayanan pengaduan yang berkualitas.
4. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antara penyelenggara layanan baik internal maupun dengan eksternal (instansi teknis terkait) mengakibatkan proses penyelesaian pengaduan tidak berjalan sesuai standar prosedur pelayanan yang ditetapkan.

#### **B. Upaya Penyelesaian**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat selalu terbuka menerima masukan (kritik/aduan). Dalam mendukung proses pelayanan publik tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi akan terus berupaya melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat, antara lain dengan upaya:

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait pelayanan pengaduan yang dilaksanakan.
2. Melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat dalam proses pelayanan pengaduan.

3. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja petugas pelayanan pengaduan serta menambah jumlah aparatur dengan kompetensi yang baik di unit layanan pengaduan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pemberian layanan pengaduan kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara penyelenggara layanan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan juga dengan Instansi Teknis terkait.

## **BAB III PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditangani oleh Kelompok Jabatan Fungsional PTSP dibawah Koordinator Jabatan Fungsional PTSP beserta Tim Teknis terkait periode Triwulan II tahun 2023.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2023 ini disusun dan dibuat, diharapkan dengan adanya laporan ini dapat berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat terkait keseluruhan proses layanan pengaduan yang dilaksanakan, juga sebagai pertanggungjawaban kami sebagai instansi pelayanan publik, dengan harapan laporan ini menjadi bahan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi kami selanjutnya dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses layanan perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi .

**BUKU REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2023**  
**BULAN APRIL**

No.	Identitas Pelapor	Sarana Penyampaian	Tanggal Pengaduan	Penelaahan			Status Penanganan		Penyelesaian		
				Kronologi Waktu	Substansi Pengaduan	Bukti	Ditangani	Disalurkan	Tanggapan	Status	Waktu dan Tanggal Penyelesaian
1	Supriyadi 082225204852	wa	4/5/2023	20:15 WIB	kami perwakilan warga gelowong gambiran tidak setuju dirikannya minimartket LK mart	ada	langsung		mohon info kepada kami nama pemilik bangunan minimarket beserta alamat lengkap untuk memudahkan kami	selesai	4/6/2023
2	Null	smart kampung	4/6/2023	08:00 WIB	permohonan ijin belum di prses pengajuan tgl 29 maret 2023	ada	langsung		mohon izin kami sampaikan bahwa terkait pengajuan SIPR masih tahap verifikasi	selesai	4/6/2023
3	Supriyadi 82225204852	wa	4/6/2023	13:16 WIB	nama pemilik bangunan mini market: Lk mart alamat lengkap dusun glowong rt 01 rw 02	ada	langsung		untuk memudahkan penelusuran dan pengecekan dokumen perizinan harus mengetahui nama lengkap pemilik	selesai	4/10/2023
4	Boen han 85156028499	wa	4/11/2023	19:17 WIB	hallo. Pilihan kelurahan tidak muncul bagaimana,	ada	langsung		mohon diperjelas kendalanya dimana, apakah saat pendaftaran atau bagaimana	selesai	4/12/2023
5	Hartono 81216794261	wa	4/11/2023	20:42 WIB	saya daftar KKPR tp pilihan kelurahan tidak muncul. Trus gmna	ada	langsung		maaf bapak, wilayah kabupaten mana ya bisa daftar melalui web : nonoss.banyuwangikab.go,id	selesai	4/12/2023
6	Hartono 81216794261	wa	4/12/2023	10:06 WIB	itu wilaya DKI jakarta saya udah lewat nonos banyuwangi.go id	ada	langsung		mohon maaf, kami segera memperbaiki dengan tim teknis, terimakasih	selesai	4/12/2023
7	Hartono 81216794261	wa	4/12/2023	12:40 WIB	baik. Karena dgn kendala ini kami tidak bisa mengirim per mohonan KKPR	ada	langsung		baik terimakasih, kami akan segera tindak lanjuti	selesai	4/12/2023
8	Frans 81367000968	wa	4/14/2023	10:29 WIB	foto copy imb diganti dgn surat sewa bisa pak	ada	langsung		silakan datang ke mal pelayanan publik lantai 2 akan didampingi oleh petugas	selesai	4/14/2023

9	Suswati haniyah	smart kampung	4/28/2023	14:02 WIB	pengajun sip ditempat kerja yg	ada	langsung		silakan datang ke MPP Banyuwangi	selesai	4/28/2023
	81234932393				baru, lewat smart kampung				bagian front office untuk mendapatkan		
					selalu diminta revisi				pendampingan		

<b>Keterangan</b>	
Pengaduan melalui <b>Website</b>	: -
Pengaduan melalui <b>SMS</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Smart Kampung</b>	: 2
Pengaduan melalui <b>Telfon 112</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Whatsapp</b>	: 7
Pengaduan melalui <b>SP4N LAPOR!</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Kotak Saran/Pengaduan</b>	: -
<b>Jumlah Pengaduan</b>	: 9

**BUKU REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2023  
BULAN MEI**

No.	Identitas Pelapor	Sarana Penyampaian	Tanggal Pengaduan	Penelaahan			Status Penanganan		Penyelesaian		
				Kronologi Waktu	Substansi Pengaduan	Bukti	Ditangani	Disalurkan	Tanggapan	Status	Waktu dan Tanggal Penyelesaian
1	Kiky vera ningtias 085806014411	wa	5/3/2023	10:47 WIB	jika tidak bisa mengedit KBLI di OSS bagaimana solusinya?	ada	langsung		mohon dicoba lagi sekarang karena tadi pagi server OSS gangguan	selesai	5/3/2023
2	Novanda 08229812453	wa	5/5/2024	12:22 WIB	kami mengajukan SKKT di aplikasi smart kampung tdk bisa	ada	langsung		apakah yang dimaksud surat keterangan tempat tinggal? Mohon saudara update terbaru smartkampung	selesai	5/5/2023
3	Ach zaini 0877569975556	wa	5/15/2023	19:09 WIB	askom met mlm mhn maaf sya mau tanya maalah pengurus HO persyaratan apa saja	ada	langsung		perihal pengurusan HO saat ini sudah tidak ada, silakan datang ke mal pelayanan publik	selesai	5/15/2023
4	Nanang 085706028465	wa	5/24/2023	09:53 WIB	proserdur pembayaran pencatatan peta wiup bagaimna	ada	langsung		pendelegasian wewenang pembe rian perizinan pertambangan dan mineral menjadi kewenangan prov	selesai	5/24/2023

Keterangan	
Pengaduan melalui <b>Website</b>	: -
Pengaduan melalui <b>SMS</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Smart Kampung</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Telfon 112</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Whatsapp</b>	: 4
Pengaduan melalui <b>SP4N LAPOR!</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Kotak Saran/Pengaduan</b>	: -
<b>Jumlah Pengaduan</b>	: 4

**BUKU REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2023**  
**BULAN JUNI**

No.	Identitas Pelapor	Sarana Penyampaian	Tanggal Pengaduan	Penelaahan			Status Penanganan		Penyelesaian		
				Kronologi Waktu	Substansi Pengaduan	Bukti	Ditangani	Disalurkan	Tanggapan	Status	Waktu dan Tanggal Penyelesaian
1	Null 81347505870	smart kampung	6/5/2023	11:45 WIB	kpn perijinan pajak reklame bisa diakses sudah lama gangguan dan tdk bisa mengajukan	ada	langsung		setiap penyampaian pengaduan harus disertai identitas nama dan alamat untuk pengecekan pengajuan izin bapak/ibu terimakasih	selesai	6/5/2023
2	Zulfa ida sarifa 82334663759	wa	6/13/2023	08:46 WIB	assalamualaikum pembuatan KKPR sy knp begitu lama sekali	ada	langsung		pengajuan KKPR a.n Zulfa Ida Sarifa masih dalam proses pembahasan oleh Forum Penataan Ruang Daerah	selesai	6/13/2023
3	Dr. ramahdani akhad 85236686293	smart kapung	6/14/2023	13:00 WIB	moohon direspon dgn cepat dan tepat mengeani verifikasi berkasnya	ada	langsung		untuk permohonan izin saudara masih dalam proses verifikasi dokumen	selesai	6/14/2023
4	Antha 81252370509	wa	6/15/2023	13:25 WIB	selamat siang. Mhn info cara perpanjang reklame sprti apa?	ada	langsung		silakan datang langsung ke MPP atau bisa mengakses ke aplikasi smartkampung pada menu MPP digital ke menu SIPR	selesai	6/15/2023
5	Hartono 81216794261	wa	6/19/2023	13:07 WIB	saya daftar KKPR tp selau revisi gambar siteplan tdk jelas/ terbaca	ada	langsung		site plan merupakan gambar dua dimensi yang memberikan rencana detail pembangunan dengan semua unsur penunjang	selesai	6/19/2023
6	Zulfi	wa	6/22/2023	11:35 WIB	pengajuan KPPR saya lama sekali di forum FPDR. Mulai tgl 12juni sampai sekarang	ada	langsung		mohon maaf atas keterlambatannya, mohon info KKPR a.n siapa ya?	selesai	6/23/2023

<b>Keterangan</b>	
Pengaduan melalui <b>Website</b>	: -

Pengaduan melalui <b>SMS</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Smart Kampung</b>	: 2
Pengaduan melalui <b>Telfon 112</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Whatsapp</b>	: 4
Pengaduan melalui <b>SP4N LAPOR!</b>	: -
Pengaduan melalui <b>Kotak Saran/Pengadu</b>	: -
<b>Jumlah Pengaduan</b>	<b>: 6</b>